

Dito Mahendra 5 Jam Diperiksa KPK Terkait Aliran Dana TPPU Nurhadi

JAKARTA (IM) – Dito Mahendra menjalani pemeriksaan hingga 5 jam oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (6/2). Dito diminta keterangannya soal aliran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

Setelah diperiksa sekitar 5 jam, Dito ke luar dari ruang penyidik KPK sekitar pukul 14.10 WIB.

Dito bungkam saat ditanyai wartawan usai selesai jalani pemeriksaan.

Sebagai informasi, Nurhadi merupakan terpidana kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Setelah perkara tersebut divonis oleh pengadilan, KPK mengendus Nurhadi menyamakan harta kekayaan yang didapatkan dari korupsi.

“Apa yang didalami saksi ini (Dito) antara lain

terkait dengan pengetahuan saksi ini mengenai dugaan adanya aliran dana, tentu ini berkaitan dengan tersangka Nurhadi dan kawan-kawan,” kata Ali saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Senin (6/2).

Dalam pemeriksaan itu, penyidik KPK mengonfirmasi aset yang diduga masih berkaitan dengan Nurhadi, termasuk di antaranya adalah kepemilikan satu unit mobil. Kendaraan tersebut merupakan sebagian aset yang bisa disampaikan KPK kepada publik.

“Satu di antaranya terkait dengan kepemilikan kendaraan mobil,” tutur Ali.

Saat ini, proses penyidikan terus dilakukan. KPK menilai, keterangan yang diberikan Dito penting terkait kasus tersebut. Adapun Dito telah mangkir pada tiga kali pemanggilan sebelumnya. ● **mei**



DITO MAHENDRA DIPERIKSA KPK

Wiraswasta, Dito Mahendra (kiri) meninggalkan Gedung Merah Putih KPK sesuai diperiksa di Jakarta, Senin (6/2). Penyidik KPK memeriksa Dito Mahendra sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

MPR Minta Masyarakat Hentikan Wacana Jabatan Presiden 3 Periode

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan meminta seluruh elemen masyarakat menghentikan wacana masa jabatan presiden tiga periode. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Januari 2023 telah menegaskan bahwa presiden yang sudah menjabat dua periode tidak bisa menjadi calon wakil presiden (cawapres).

“Sebenarnya (Pasal 7) konstitusi UUD NRI tahun 1945 sudah mengatur tentang masa jabatan presiden bahwa masa jabatan presiden lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan,” kata Syarif Hasan di Surabaya melalui keterangannya, yang dikutip Senin (6/2).

Syarief mengatakan, MK telah menegakkan konstitusi

dengan mengeluarkan amar putusan terhadap permohonan Partai Berkarya yang menginginkan presiden dua periode boleh maju menjadi calon wakil presiden.

“Memang sudah seharusnya konstitusi ditegakkan,” ujarnya. Dengan putusan MK ini, kata politikus senior Partai Demokrat ini, masa jabatan presiden hanya dua periode saja. “MPR akan mengawal putusan MK ini. Kita harus menegakkan konstitusi,” tuturnya.

Jika ada pihak yang masih mewacanakan presiden yang sudah menjabat dua periode bisa maju kembali sebagai calon wakil presiden atau wacana masa jabatan presiden tiga periode, hendaknya menghentikan wacana tersebut. ● **han**

KPU Pastikan Pemilu 2024 Digelar Sesuai Jadwal, Tak Ada Penundaan

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari memastikan Pemilihan Umum (Pemilu) digelar sesuai jadwal. Hal tersebut sekaligus menepis isu penundaan Pemilu 2024.

“KPU itu yang menyelenggarakan Pemilu, tapi kami harus memastikan bahwa pemilu jalan terus sesuai dengan waktu dan jadwal yang ditentukan, anggaran juga sudah disiapkan. Anggaran Pemilu 2024 yang disetujui Pemerintah sebesar Rp76,6 triliun. Namun, pada 2023, KPU RI mendapat anggaran Rp 15.987.872.001.

“Sudah 2023 didaftarkan anggaran itu sudah diberikan kepada KPU,”

ujarnya. Ia tak ingin menjawab soal alasan wacana penundaan Pemilu tersebut. KPU, kata dia, hanya bertugas menjalankan UU agar Pemilu terlaksana sesuai jadwal.

“Jangan tanya saya kalau KPU kan memastikan pemilu jalan. Terus kalau ada orang ngomongin Pemilu ditunda tanya orang itu,” katanya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas ketua umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono mengatakan, penundaan Pemilu 2024 masih diperluangkan yakni *fifty-fifty*.

Mardiono mengungkapkan hal tersebut dalam wawancara khusus bersama MNC Portal Indonesia, Kamis 2 Februari 2023.

“Saya melihat bisa *fifty-fifty* (penundaan Pemilu 2024 terjadi),” kata Mardiono. ● **mei**

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



RAPAT KERJA KEPALA OTORITA IKN DENGAN KOMISI XI

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono (kedua kiri) bersama Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dhony Rahajoe (kedua kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2). Rapat tersebut membahas evaluasi dan capaian kinerja tahun 2022 dan rencana kerja tahun 2023.

Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Terkait Kasus BAKTI Kominfo

Penyidik KPK menggali keterangan Isa Rachmatarwata untuk mengetahui sumber anggaran dalam proyek BTS 4G BAKTI Kominfo.

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung kembali memeriksa Direktur Jenderal (dirjen) anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata (IR) terkait penyidikan dugaan korupsi penyedia infrastruktur BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“IR selaku Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI,” kata Kapuspenkum Kejagung, Haryoko Sumedana, Senin (6/2).

Kasubdit Penyidikan Jampidsus Kejagung, Haryoko Ari Prabowo sebelumnya mengatakan pemeriksaan terhadap Isa Rachmatarwata dilakukan untuk mengetahui

hui sumber anggaran dalam proyek tersebut.

“Terkait dengan anggaran kita pastikan. Anggaran-anggaran itu menggunakan rupiah murni atau anggaran dari PNPB ini lagi kita proses *fix-nya* seperti apa,” jelasnya.

“Ada dugaan ini kan ada rupiah murni ada dari PNPB tapi ini masih kita dalam. Oleh karena itu kita masih periksa Dirjen,” jelasnya.

Selain IR, Kejagung memeriksa lima orang saksi lain di antaranya FY selaku Karyawan PT Astel Sistem Teknologi, CM selaku CEO PT Huawei Tech Investment,

LW selaku Direktur Utama PT ZTE Indonesia.

Kemudian HL selaku Direktur PT FiberHome Technologies Indonesia dan DM selaku Sales Director PT FiberHome Technologies Indonesia. “Keenam orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI,” jelasnya.

Sebelumnya, Isa Rachmatarwata telah diperiksa pada Selasa (31/1/2023). Pemeriksaan terhadap Isa dilakukan untuk kepentingan penyidikan terkait status penganggaran dalam proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kemenkominfo 2020-2022.

“Rencana pemeriksaan Dirjen Anggaran ini sudah

dilakukan sejak dari pekan lalu untuk kita (penyidik) mengetahui program BTS BAKTI ini, penganggarannya bersumber dari mana, berapa jumlahnya, apakah tahun jamak atau bagaimana,” ujar Direktur Penyidikan Kuntadi, Selasa (31/1) lalu.

Kasus ini terungkap pada November 2022 lalu, nilai anggaran yang diketahui penyidik dalam proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kemenkominfo ini berkisar Rp10 triliun.

Dugaan tindak pidana korupsi berupa dugaan mark-up maupun pembangunan fiktif yang dilakukan ditaksir merugikan keuangan negara senilai Rp 1 triliun lebih. “Nilai (Rp) 10 triliun itu seluruh kontraknya. Kerugiannya itu mungkin sekitar Rp1 triliun,” kata Kuntadi. ● **han**

SIDANG KASUS PEMBUNUHAN BRIGADIR J Jaksa Minta Hakim Tolak Pleidoi Arif Rachman dan Baiquni Wibowo

JAKARTA (IM) - Terakwa Arif Rachman Arifin dan Baiquni Wibowo kembali menjalani sidang dugaan kasus Obstruction of Justice kasus pembunuhan berencana Brigadir J, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (6/2).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat dalam repliknya meminta hakim menolak pleidoi atau pembelaan keduanya.

“Menolak seluruh pleidoi dari tim penasihat hukum terakwa Baiquni Wibowo dan dari terakwa Baiquni Wibowo,” ujar JPU di persidangan, Senin (6/1).

Arif Rachman Arifin menjalani sidang Replik di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan. Sidang dipimpin ketua majelis hakim, Ahmad Suhel. Dalam repliknya, Jaksa menilai Arif tak punya itikad baik dalam tindakannya di kasus itu.

Jaksa mengatakan, Arif Rachman tak jujur pada penyidik Polres Jaksel terkait kejanggalan dalam rekaman CCTV yang menjelaskan Brigadir J masih hidup. Ari merupakan anggota kepolisian, tapi melakukan tindakan tidak patut dengan menyuruh Baiquni Wibowo menghapus seluruh file sehingga tak ada bukti, padahal itu di luar lingkup pekerjaannya sebagai Wakaden Biro Paminal Polri.

“Terakwa juga merusak dengan mematahkan laptop microsoft surface warna hitam yang merupakan barang bukti tindak pidana, maka perbuatan terakwa Arif tidak dapat dikategorikan sebagai itikad baik. Arif hanya tetap diam dan merahasiakannya hingga terbongkar dengan sendirinya,” ujar Jaksa di persidangan, Senin (6/2).

Jaksa menerangkan, berkaitan daya paksa yang dialami Arif sebagaimana disampaikan dalam Pleidoi-nya itu dinilai tak terbukti. Pasalnya, Ferdy Sambo tidak melakukan paksaan atau ancaman secara nyata terhadap Arif.

Maka itu, Jaksa meminta hakim mengesampingkan pleidoi Arif dan pengacarannya sebagaimana disampaikan pada persidangan sebelumnya. Sementara jaksa membacakan replik di persidangan Baiquni Wibowo. Sidang di ruang sidang 3 PN Jakarta Selatan. Persidangan dipimpin Ketua majelis hakim, Afrizal Hadi.

JPU dalam repliknya meminta hakim menolak seluruh pleidoi kubu terakwa Baiquni Wibowo. Kemudian, meminta hakim menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan Jaksa yang telah dibacakan pada hari Jumat, 27 Januari 2023 lalu. ● **han**

Tiga Bos Perusahaan Konstruksi Diperiksa KPK soal Suap Bupati Bangkalan

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga bos perusahaan konstruksi, PT Daya Radar Haura, Senin (6/2).

Dua di antaranya merupakan Komisaris PT Daya Radar Haura, Inta Afriluni dan Aji Alfariy, serta Direktur PT Daya Radar Haura, Abdul Hafit. Ketiganya akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Ketiganya bakal dimintai keterangannya terkait kasus dugaan suap pengatur proyek yang menjerat Bupati nonaktif Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron (RALAI) dkk.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK RI, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jaksel, atas nama tersebut,” kata Kabag Pemerintahan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (6/2).

Bupati nonaktif Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron (RALAI) ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait lelang jabatan dan pengaturan proyek di lingkungan Bangkalan.

Selain itu, Abdul Latif Amin Imron juga ditetapkan tersangka suap lelang jabatan

Tiga Bos Perusahaan Konstruksi Diperiksa KPK soal Suap Bupati Bangkalan

bersama dengan lima orang lainnya yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan, Agus Eka Leandy; Kadis PUPR Bangkalan, Wildan Yulianto.

Kemudian, Kadis Ketahanan Pangan Bangkalan, Achmad Mustaqim; Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan, Hosin Jamil; serta Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan, Salman Hidayat.

Dalam perkara ini, Abdul Latif Amin Imron diduga menerima suap sebesar Rp5,3 miliar melalui uang kepercayaan. Uang suap itu berkaitan dengan lelang jabatan serta pengaturan proyek di Bangkalan. ● **han**

PENGUMUMAN
Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. MULTI MITRA NUSANTARA INTERNASIONAL (PT. MULTIMITRA NUSANTARA INTERNASIONAL), berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”), nomor 1, tanggal 06 Februari 2023, dibuat oleh BAGUS NUGRAHA KUSUMA WARDANA, SH., N.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, telah diputuskan:
1. Menyetujui pembubaran dan likuidasi Perseroan,
2. Menunjuk Direktur Perseroan yaitu Drs. GUNAWAN SASTRAWIGUNA selaku Likuidator Perseroan untuk melakukan pembebasan (penyelesaiannya) sepenuhnya.
Bagi Para Pihak yang keberatan atas keputusan tersebut, agar dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari setelah pengumuman ini, dapat menghubungi LIKUIDATOR dengan alamat di:
Komplek Harapan Kita Lantai 2 Room 2015,
Jl. Letjen S. Parman Kavling 87, Slipi, Jakarta Barat
Demikian pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 147 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 07 Februari 2023
Likuidator



RAPAT KERJA PEMBAHASAN PEMILU BERSAMA KOMISI II

Ketua KPU Hasyim Asyari (kanan) bersama Anggota KPU Idham Holik (kiri) saat rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2). DPR menerima dan menyetujui rancangan peraturan KPU tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk DPR RI provinsi kabupaten kota.

FOTO: ANT

mandiri
PEMBERTAHUAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Kepada Yth.,
CV. Putra Utama
Di tempat

Menunjuk Perjanjian Pengalihan Piutang Bank (Cessie) telah dilakukan dengan Akta Notaris Ade Suryatni, SH., Mkn. No. 05 tanggal 02 Februari 2023 dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Sesuai catatan administrasi kami, jumlah kewajiban kredit Saudara per tanggal 17 Januari 2023 adalah sebesar **Rp. 104.999.999,01 (terbilang seratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah dan satu sen)**.
- Sebagai upaya penyelesaian fasilitas kredit Saudara maka pada tanggal 02 Februari 2023, kami telah melaksanakan pengalihan piutang (Cessie) atas fasilitas kredit Saudara berikut dokumen yang berhubungan dengan fasilitas kredit Saudara kepada kreditor baru sbb:
 - Nama : **Edy Pamungkas**
 - Alamat : **Jl. H. Tagwa No.48 RT.005 RW.009 Kel. Jatimarkam Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat**

Dengan telah beralihnya piutang tersebut maka setiap dan/atau seluruh piutang atau tagihan kredit Saudara menjadi hak dan milik dari kreditor baru tersebut.

Jakarta, 07 Februari 2023
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Retail Collection & Recovery Region V